

Paradigma Komunikasi Pemerintah Modern: Studi Kasus Implementasi *E-Government* di Singapura

Siska Martelina¹, Anan Dhita Febriyanti², Sekar Jatikusuma Ningtyas³, Marcella Dwi

Nuraini⁴, Dwiky Kirana Bagaskoro⁵

Universitas Negeri Surabaya^{1,2,3,4,5}

25041184131@mhs.ac.id¹, 25041184172@mhs.ac.id², 25041184127@mhs.ac.id³,
25041184054@mhs.ac.id⁴, 25041184057@mhs.ac.id⁵

ABSTRAK: Kemajuan teknologi informasi membuka luas kesempatan untuk bidang politik, birokrasi, sosial dalam masyarakat. Masyarakat dapat terlibat secara langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik. Hal ini dapat difasilitasi oleh pemerintah dengan adanya sistem pemerintahan berbasis teknologi digital yang disebut dengan Pemerintahan Elektronik (*Electronic Government*) atau lebih dikenal dengan *e-government*. *E-Government* bukan hanya sekedar sebuah website pada internet, melainkan sudah mencakup fungsi yang sangat luas seperti proses dan struktur yang memfasilitasi interaksi secara elektronik antara pemerintah dengan masyarakat. Interaksi bertujuan untuk memudahkan dan mendorong terciptanya demokrasi serta penyelenggaran pemerintahan yang lebih efisien, aktual serta interaktif. Dapat dikatakan bahwasannya *e-Government* mensyaratkan adanya transparansi dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu negara di Asia Tenggara yang sudah menerapkan *e-Government* adalah Singapura. Berkat kemajuan teknologi yang membawa perubahan dan komitmen pemerintah untuk mewujudkan sistem pemerintah yang lebih baik dalam misi meningkatkan pelayanan publik.

Kata Kunci: Teknologi, *E-government*, efisien.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi yang pesat dan kemunculan Internet telah mengubah harapan masyarakat terhadap pemerintah dan layanan publiknya. Didorong oleh

tuntutan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih tanggap, para pemimpin sektor publik berusaha mencari cara terbaik memanfaatkan teknologi baru guna memberikan layanan kepada warga.

Penggunaan teknologi oleh pemerintah, terutama aplikasi berbasis web untuk meningkatkan akses warga terhadap layanan publik serta memungkinkan transaksi daring, disebut *e-Government* (pemerintahan elektronik). Dengan memindahkan layanan tradisional yang berbasis kertas dan tatap muka ke internet, *e-Government* berpotensi memberikan cara tercepat dan paling nyaman bagi warga untuk memperoleh layanan pemerintah.

Pemerintahan elektronik (*e-Government*) memungkinkan kinerja yang tinggi. Ia memungkinkan hasil yang lebih baik dengan biaya lebih rendah, memberikan nilai maksimum dari setiap sumber daya yang digunakan. *E-Government* menyediakan jalur untuk peningkatan layanan publik, bahkan menciptakan layanan baru yang sebelumnya belum terbayangkan. Dalam prosesnya, *e-Government* membantu pemerintah mentransformasi cara penyampaian layanan, sehingga mereka dapat memenuhi kewajiban terhadap para pemangku kepentingan dengan cara yang paling efisien dan hemat biaya (Accenture, 2004, hlm. 2).

E-Government telah didefinisikan dan dikonseptualisasikan dalam berbagai cara di literatur. Beberapa definisi

memandang *e-Government* dari perspektif sempit, yaitu penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta internet untuk meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan. Namun, definisi lain melihatnya dari perspektif yang lebih luas sebagai reformasi sistem dan rekayasa ulang proses pemerintahan (Grant dan Chau, 2005).

Singapura adalah salah satu negara yang telah melaksanakan inisiatif *e-Government* secara bertahap dan berhasil.

Keberhasilan Singapura diakui secara luas di dunia internasional, yang tercermin dari berbagai penghargaan dan peringkat global yang diterimanya. Saat ini, Singapura menempati peringkat kedua di dunia dalam hal layanan *e-Government* (Brown University, 2004) dan juga peringkat kedua dunia dalam kepemimpinan pemerintahan elektronik (Accenture, 2004).

Dalam konteks analisis studi kasus *e-Government* di Singapura untuk memperdalam pemahaman mengenai peran kepercayaan dalam penerimaan dan adopsi *e-Government*. Dari studi ini, kepercayaan (*trust*) muncul sebagai kerangka teoritis yang bermanfaat bagi negara-negara lain di dunia untuk memahami dan merumuskan strategi keberhasilan implementasi *e-Government*.

mereka.

METODE

Metode pemerolehan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik studi pustaka, teknik baca, dan teknik catat agar data terkumpul secara sistematis. Teknik baca dilakukan dengan cara membaca secara cermat keseluruhan dari referensi jurnal terakreditasi yang dipilih sebagai fokus penelitian, penandaan pada bagian-bagian tertentu yang mengandung unsur-unsur yang diteliti serta mendeskripsikan semua data-data yang diperoleh dengan studi pustaka. Penelitian ini akan menghasilkan data-data yang berupa kalimat yang termasuk dalam kajian penelitian ini, yaitu tentang keberhasilan pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan *e-Government* dalam sistem birokrasinya.

Jenis analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif digunakan untuk menemukan pengetahuan seluas-luasnya terhadap subjek penelitian pada waktu tertentu. Langkah analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu kategorisasi yakni memilah data berdasarkan kategori yang telah ditentukan sesuai dengan fokus penelitian yaitu bagaimana sistem *e-Government* dapat diterapkan. Kedua,

interpretasi dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif menggunakan teori kepercayaan warga (*Citizen Trust Development*). Terakhir inferensi, yakni mengaitkan teori dan referensi pada pengetahuan lain yang mendukung. Inferensi penelitian ini meliputi pemahaman mengenai bagaimana pemerintah Singapura berhasil dalam membangun kepercayaan publik melalui *e-Government*. Dengan langkah-langkah yang strategis

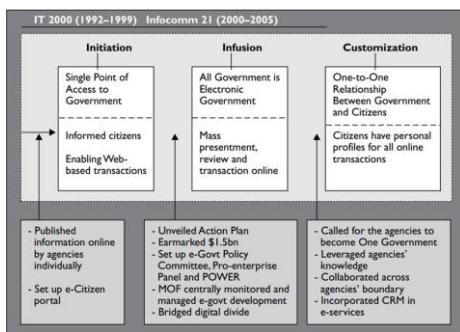
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi *e-Government* di Singapura adalah bentuk keberhasilan negara ini dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan, hal ini juga menjadi sebuah langkah perubahan atau transformasi paradigma komunikasi pemerintahan menjadi modern.

Temuan lain menunjukkan bahwa seluruh institusi pemerintahan yang berada di Singapura telah memiliki portal *e-Government* masing-masing, dan Singapura menjadi negara dengan kepemilikan pribadi tertinggi dunia sebesar 61% dari total penduduk.

a. Profil Implementasi *E-Government* di Singapura

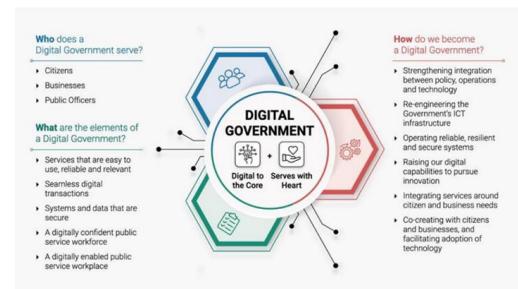
Melalui laman resmi pengembang E-government Singapura yakni Government Technology Agency of Singapore (tech.gov.sg) dikatakan bahwa Program Komputerisasi Nasional di Singapura dimulai pada tahun 1980-an. Inisiasi untuk membuat layanan pemerintah digital atau E-Government di Singapura ini dilatar belakangi oleh keterbatasan tenaga kerja yang meningkat dengan angkatan kerja yang mulai menua, selain itu kemajuan teknologi dan pandemi COVID-19 juga menjadi salah satu alasannya, dimana saat itu masyarakat digital berkembang pesat dan aktivitas dunia dialihkan ke bentuk digital. Berikut skema awal pengembangan E-Government di Singapura:



Gambar 1.

Dewasa ini digitalisasi menjadi pilar utama transformasi layanan yang memungkinkan layanan publik yang lebih kuat dengan petugas yang lebih terampil. Selain itu layanan digital ini diharapkan lebih transparan dan tidak memihak pada

keuntungan perorangan pemerintah. Visi dari E-Government Singapura adalah “Digital to the Core, and Serves with Heart (digital hingga inti, dan melayani dengan hati). Digitalisasi sendiri bukan inti yang diharapkan melainkan menerapkan visi “Digital to the Core”, dalam penerapan visi ini diperlukan digitalisasi mendalam di berbagai lapisan pemerintahan untuk dapat dimanfaatkan sepenuhnya manfaatnya. Tidak sampai disitu, selanjutnya E-Government Singapura juga memiliki visi “Serves with Heart” dimana layanan dalam E-Government diharapkan tidak hanya cepat dan otomatis namun juga masih memungkinkan memberikan pengalaman dipersonalisasi dalam pelayanannya. Hal tersebut diharapkan untuk menumbuhkan tingkat penerimaan kemudian kepercayaan warga terhadap layanan pemerintahan digital melalui penyampaian kebijakan dan layanan yang lebih relevan.



Gambar 2.

Dalam laman resmi E-Government Singapura yakni Gov.SG para warga negara Singapura dapat mengakses layanan yang mereka butuhkan dengan mudah, beberapa layanan yang tersedia dalam laman E-Government Singapura diantaranya:

- Singpass: Sistem identitas digital yang memungkinkan penduduk mengakses 2700 layanan hanya dengan melakukan autentikasi menggunakan biometrik atau SMS Two-Factor Authentication (2FA) menggunakan satu akun digital.
- LifeSG: Sistem yang mengintegrasikan layanan pemerintah guna mempermudah proses pencarian dengan menyediakan tips relevan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi yang terus berubah.
- SGFinDex: Sistem digital publik yang menggunakan identitas digital nasional untuk memungkinkan individu mengelola dan mengakses informasi keuangan yang disimpan di berbagai lembaga pemerintah dan lembaga keuangan.
- FileSG: Sistem yang memudahkan distribusi dan pengelolaan file

resmi yang diterbitkan oleh pemerintah kepada kita, dengan layanan dapat memverifikasi keasliannya.

- Student Learning Space: platform inti untuk pembelajaran yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengubah pengalaman belajar siswa Singapura melalui penggunaan teknologi yang terarah. Platform ini dapat diakses oleh semua pemimpin sekolah, guru, dan siswa dalam sistem sekolah nasional, memastikan akses yang setara terhadap sumber daya pendidikan berkualitas.
- Career Kaki: asisten coaching berbasis AI yang dirancang untuk memberikan panduan personal yang disesuaikan dengan keterampilan, membantu menemukan wawasan yang dapat diandalkan dan peluang pasar kerja lokal.
- DigiMC: Sistem pencatatan riwayat medis digital yang memungkinkan catatan medis tetap sinkron, dan mengurangi waktu yang dihabiskan untuk tugas administratif dengan pasien

sehingga memudahkan pengajuan ke pemberi kerja atau sekolah.

Dan masih banyak lagi layanan yang diberikan di dalam laman resmi E-Government Singapura yang memudahkan para warga negaranya.

b. Analisis Paradigma Komunikasi Pemerintah Modern

Cara pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat menentukan bagaimana pemerintah di mata masyarakat. Pemerintah merupakan aktor utama dalam pembentukan segala apa yang hadir dalam masyarakat, situasi yang ada dalam masyarakat menggambarkan bagaimana pemerintahan bekerja. Apabila masyarakatnya baik, maka pemerintahannya berjalan dengan baik. Kondisi masyarakat merupakan cermin apa yang terjadi di pemerintahan.

Paradigma komunikasi pemerintahan modern adalah cara baru bagaimana pemerintah berkomunikasi dengan masyarakat yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi digital. Paradigma baru ini menggeser komunikasi pemerintah dari model satu arah yang hanya mengirim informasi ke masyarakat menjadi komunikasi dua arah yang juga memperbaiki sistem menjadi lebih

interaktif, responsif, dan kolaboratif secara keseluruhan. Dalam paradigma ini, pemerintah dituntut untuk menjadi lebih fleksibel dalam hal penerapan dan sistem yang dijalankan.

Temuan menunjukkan bahwa paradigma komunikasi pemerintahan modern telah mengalami perubahan signifikan seiring dengan kemajuan teknologi digital dan meningkatnya kesadaran serta harapan masyarakat terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik. Pemerintah dalam hal ini tidak lagi menjadi satu-satunya sumber informasi, melainkan peran pemerintah bertambah menjadi sebagai fasilitator komunikasi dua arah antara negara dan masyarakatnya.

Dalam konteks modern, komunikasi pemerintah berfokus pada hal terkait pembentukan dialog publik yang berkelanjutan serta implementasi kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari kasus Singapura, dimana pemerintahannya secara bertahap membentuk sebuah sistem pemerintahan digital atau *electronic*. Implementasi *e-Government* ini menunjukkan fenomena pergeseran dari paradigma komunikasi yang berpusat pada birokrasi menuju komunikasi yang lebih partisipatif dan kolaboratif.

Secara teoritis, perubahan ini sejalan dengan konsep komunikasi tata kelola, dimana pendekatan komunikasinya difokuskan pada keterlibatan semua pihak dan pemangku kepentingan dalam setiap proses. Pemerintah berperan sebagai motor penggerak dialog dan kerja sama di antara pemangku kepentingan. Model ini jelas berbeda dengan paradigma yang ada, di mana komunikasi cenderung bersifat *top-down* dan berorientasi pada perintah satu arah.

Pergeseran paradigma ini juga dipengaruhi oleh upaya pemberantasan ketidakmampuan digital di masyarakat dan pengembangan *e-Government*, yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan publik. Kepercayaan publik dapat didapat ketika pemerintah berhasil beradaptasi dengan teknologi digital dengan baik. Hal ini karena mereka lebih cepat, lebih terbuka, dan dapat diukur dalam berkomunikasi.

Paradigma komunikasi pemerintah modern mewakili perubahan fundamental dalam hubungan sosial dan pemerintah. Komunikasi tidak lagi hanya sebagai sarana transmisi informasi, tetapi sebagai sarana strategis untuk membangun legitimasi, kepercayaan, dan partisipasi publik dalam proses pemerintahan.

c. Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi di Singapura

Banyak faktor yang menentukan keberhasilan Singapura dalam keberhasilannya menjalankan sistem *e-Government* untuk menjalankan birokrasinya. Pengembangan *e-Government* dimulai pada tahun 1980. Rencana pembangunan infrastruktur jaringan teknologi komunikasi telah ditetapkan oleh pemerintah Singapura. Tiga yang pertama adalah IT 2000 pada tahun 1992, Perjanjian TI Nasional pada tahun 1986, dan Program Informasi Pelayanan Publik pada tahun 1981 (Miya & Timbul, 2024).

Beberapa faktornya antara lain adalah; (1) faktor teknologi: faktor teknologi merupakan faktor terbesar yang menjadi penentu berhasil atau tidaknya implementasi *e-Government* ini, menurut laporan The World Intellectual Property Organization (WIPO), Singapura menempati peringkat delapan dalam skala global dalam Global Innovation Index (GII). Singapura menempati peringkat pertama dalam pilar institusi dan ketiga dalam kecanggihan bisnis. Hal ini cukup membuktikan bagaimana Singapura dapat dikatakan siap dan mampu untuk menjalankan sistem *e-Government*, (2) kebijakan: dalam hal kebijakan,

pemerintah Singapura berhasil menciptakan kebijakan yang mendukung suksesnya implementasi *e-Government* di negaranya. Pemerintah Singapura membentuk sebuah kelompok informasi dan manajemen yang dan mengadopsi yang menggambarkan bidang-bidang penting dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menunjukkan bagaimana pemerintah Singapura memberikan dukungan penuh pada penerapan *e-Government*, , (3) sumber daya manusia:, Kedua, investasi dengan nilai besar yang dialokasikan pemerintah Singapura pada periode 2000-2003 senilai US\$932 juta bukan sekedar untuk infrastruktur, tetapi juga untuk membangun fondasi budaya digital yang didukung oleh pelatihan intensif bagi aparatur sipil agar kemudian dapat berorientasi pada layanan publik yang lebih responsif dan inovatif.

Kebijakan *e-Government* di Singapura memiliki beberapa pembaharuan yang kemudian membedakan sistem yang dijalankan Singapura dengan sistem yang dijalankan di negara lain. Hal ini sekaligus menjadi faktor utama keberhasilan sistem *e-Government* di Singapura.

Pertama, dalam hal orientasi pada pelayanan publik dan kompetensi sumber daya manusia, Singapura dapat dikatakan menonjol dan unggul. Berbeda dengan beberapa negara yang cenderung lebih fokus terhadap teknologi, Singapura juga fokus terhadap pengembangan sumber daya manusianya. Hal ini terlihat dari kebijakan terpusat di mana Kementerian Keuangan menjadi otoritas tunggal dalam menyetujui dan mendanai semua proyek *e-Government* (Azza et al., 2023), sehingga Pendekatan ini menjadikan SDM sebagai enabler utama dalam memastikan teknologi dapat dimanfaatkan optimal untuk pelayanan masyarakat. Hal ini menunjukkan pentingnya memperbaiki sumber daya manusia sebelum memperbaiki teknologi. Sebab alat tidak akan berarti tanpa manusia yang menggerakkan.

Ketiga, Singapura secara eksplisit menggabungkan kebijakan teknologi dengan kebijakan kolaborasi lintas sektor, yang kemudian berhasil menjadikan *e-Government* bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat dalam pelaksanaannya. Pendekatan multi-stakeholder ini memungkinkan inovasi berkelanjutan dan solusi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna. Pola

ini mengurangi resistensi budaya birokrasi dan mempercepat adopsi layanan digital.

Dengan pendekatan yang holistik dan multi-dimensi ini, Singapura berhasil menjadikan *e-Government* sebagai alat yang efektif untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi, dan kepuasan publik secara luar biasa, sekaligus mengurangi potensi korupsi melalui integrasi sistem digital yang komprehensif.

d. Dampak Implementasi E-Government

Perkembangan sistem E-Government di Singapura telah menjadi salah satu contoh suksesnya sistem pemerintahan yang dijalankan secara digital. Melalui berbagai inovasi inisiatif yang terencana matang setiap periodenya pemerintah Singapura berhasil membangun E-Government yang efisien dan berorientasi pada kebutuhan personal warga negaranya. Implementasi E-Government di Singapura telah berdampak di berbagai aspek kehidupan warga negaranya serta berdampak pada citra dan reputasi negara Singapura itu sendiri: berikut merupakan uraiannya:

a. Dampak Positif

- Efisiensi biaya dan waktu operasional: Sistem E-Government yang terintegrasi mendukung

efisiensi biaya dan waktu operasional dimana tidak memerlukan begitu banyak pegawai sehingga tidak perlu banyak biaya operasional juga efisiensi waktu kerja para pegawai dengan pegawai pemerintahan yang dapat bekerja lebih efisien karena sistem yang telah terhubung.

- Kemudahan akses layanan: Sistem yang telah terintegrasi, terpesonalisasi, dan dapat diakses kapan saja oleh masyarakat dapat memudahkan masyarakat yang akan mengurus sesuatu ke pemerintahan.
- Meningkatkan kepercayaan warga negara terhadap pemerintah: Sistem yang telah dijalankan terbukti mendapat respon positif dari masyarakat karena begitu efisien kegunaannya, dengan demikian rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah naik secara tidak langsung dan selanjutnya jika pemerintah akan membuat kebijakan baru maka pemerintah akan dengan mudah mendapatkan dukungan dari masyarakat.

- Peningkatan pendapatan negara: Selain dari penghematan biaya operasional, E-Government di Singapura juga mendukung kegiatan bisnis yang ada di Singapura sehingga secara tidak langsung akan meningkatkan devisa negara.
- Citra dan reputasi negara: Sistem E-Government Singapura yang telah sukses diimplementasikan dan membawa begitu banyak dampak baik membuat citra dan reputasi negara Singapura semakin berkembang baik di mata dunia.

Meskipun terdapat banyak dampak positif dari program ini, terdapat pula dampak negatif atau tantangan yang muncul sebagai berikut:

b. Dampak Negatif

- Kesenjangan digital: Sistem pemerintahan yang digital memungkinkan kesulitan pada para lanjut usia yang tidak memiliki pendamping untuk mengakses sistem, meskipun telah diberikan penyuluhan tentang sistem ini.
- Masalah keamanan dan privasi: Di tengah proses digitalisasi yang semakin luas, ancaman terhadap

keamanan siber dan penyalahgunaan data pribadi menjadi tantangan yang terus berkembang. Sistem e-Government di Singapura juga tidak terlepas dari risiko tersebut.

- Ketergantungan teknologi: Saat semua sistem berpindah menggunakan sistem digital maka akan menimbulkan masalah jika suatu saat terjadi serangan siber pada sistem tersebut.
- Ancaman ekonomi dan sosial jangka panjang: Akan terjadi peningkatan biaya operasional akibat ketergantungan teknologi dan potensi pengangguran jika proses otomatisasi berlebihan.

Dari penyampaian poin-poin di atas terlihat bahwa dampak positif yang ada lebih banyak dibandingkan dampak negatif yang kemungkinan akan muncul, demikian program ini dapat dinyatakan berhasil dengan tetap harus memperhatikan tantangan-tantangan kedepannya agar dampak negatif yang ada dapat dicegah atau dikurangi.

KESIMPULAN

Implementasi e-Government di Singapura terbilang berhasil sebagai bukti nyata transformasi paradigma komunikasi

pemerintahan menuju era digital yang modern dan lebih efisien. Berkat kerja sama dari berbagai pihak mulai dari pemerintah itu sendiri, rakyat, hingga pihak swasta yang akhirnya menghasilkan efisiensi dalam menjalankan sistem pemerintahannya dengan pemanfaatan kemajuan teknologi.

Dengan demikian, keberhasilan e-government Singapura tidak hanya terletak pada adopsi teknologi terbaru, tetapi juga pada pondasi kokoh berupa kolaborasi strategis. Sinergi antara visi pemerintah yang progresif, partisipasi aktif rakyat dalam pemanfaatan layanan digital, dan inovasi dari sektor swasta telah menciptakan sebuah ekosistem digital yang utuh.

Hasilnya adalah peningkatan signifikan dalam efisiensi layanan publik, transparansi tata kelola, dan kemudahan berinteraksi antara warga negara dan pemerintah. Model ini menjadikan Singapura sebagai studi kasus global yang menunjukkan bahwa e-government yang efektif adalah hasil dari upaya bersama, di mana teknologi berfungsi sebagai fasilitator utama untuk mencapai pemerintahan yang lebih responsif dan berorientasi pada warga.

DAFTAR PUSTAKA

- Faizah, A. F., Rosadi, S. D., Pratama, G. G., & Dharmawan, A. F. (2023, Agustus). Pengaruh Perlindungan Data Pribadi Melalui Otoritas Pengawas Di Indonesia Berdasarkan Perbandingan Hukum Hong Kong Dan Singapura. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 1(3), 4. <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1222>
- Jalma, H., Aromatica, D., Ariany, R. (2022, Agustus). Analisis Penerapan Paradigma e-Government Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan. *Jurnal Administrasi Negara*, 28(2).
- Putri Manurung. (n.d.). Penerapan E-Government di beberapa Negara. <https://putrimanurung09111003026.blogspot.com/2014/09/penerapan-e-governement-dibeberapa-negara.html>

- Ramadhan, S. A., Purnomo, P. E. (2024, November). Comparative Analysis of the E-Government Development Index: A Case Study of Singapore and Afghanistan. *Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Politik*, 26(3).
- Sutopo, B., Wulandari, T. R., Adiati, A. K., & Saputra, D. A. (2017). E-government, audit opinion, and performance of local government administration in Indonesia. *Australasian Accounting, Business and Finance Journal*, 11(4), 6–22.
- <https://doi.org/10.14453/aabfj.v1i14.2>
- Saputra, R. A. (2018). Penilaian Kualitas Layanan E-government dengan Pendekatan Dimensi E-Govqual dan Importance Performance Analysis (IPA). *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*,
- 2(5), 1794–1802
- Wau, M. M., Dompak, T. (2024). Perbandingan Implementasi E-Government Di Indonesia Dengan Singapura (Studi Kasus Pelaksanaan E-Government).